

DINAS KESEHATAN  
KOTA PAREPARE

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## TAHUN 2023

No : 000/01/LKjIP/2024  
Tanggal : 29 Februari 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Jualah Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2023, merupakan gambaran capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Parepare dan juga sebagai bahan evaluasi dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2022 yang searah dengan Visi dan Misi Bapak Walikota Parepare.

Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Kesehatan Parepare Tahun 2023 dalam pencapaian target RPJMD 2018-2023. dan juga dapat laporan ini dapat menjadi referensi yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan kesehatan khususnya di Dinas Kesehatan Kota Parepare

Parepare, Februari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PAREPARE,**

**Rahmawaty, SKM, M.Kes (MARS)**

Pembina Tingkat I

Nip. 19750121 200212 2 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum Organisasi .....	2
D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama.....	4
E. Struktur Organisasi.....	7
<b>BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Tujuan dan Sasaran .....	12
B. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	16
E. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	16
F. Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	17
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	19
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	20
C. Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	30
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sehingga pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Kesehatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Gambaran pelayanan kesehatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare merupakan gambaran hasil penyelenggaraan upaya kesehatan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan *penyelenggaraan* pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare dari tahun 2018-2023 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai suatu sistem.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Parepare diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas

Dinas Kesehatan Kota Parepare. Dalam struktur organisasi, Dinas Kesehatan Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Parepare melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare, dengan tugas pokok dan fungsi :

### **1. Tugas Pokok**

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Parepare mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsi.

### **3. Rincian Tugas**

- a. Rincian Tugas Dinas Kesehatan Daerah sebagai berikut :
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja bidang kesehatan;
- d. Mengendalikan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan ;
- e. Melaksanakan dan menyelenggarakan bidang kesehatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan arahan, membina dan menilai kinerja bawahan lingkup Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesehatan;
- h. Menyusun dan membuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

### 1. Isu Strategis

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dalam urusan kesehatan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan khususnya dalam urusan kesehatan adalah :

1. Transformasi Sistem Kesehatan Nasional berupa transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan dan Teknologi Kesehatan. Transformasi sistem kesehatan merupakan suatu upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas dalam kesehatan antar wilayah.
2. Responsif Gender di bidang Kesehatan  
masih banyak terdapat ketimpangan antara status kesehatan pada perempuan dan laki- laki. Masalah gender yang harus diprioritaskan penanganannya, adalah masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI), pemberantasan Tuberkulosis Paru, Malaria, HIV/AIDS, masalah gizi masyarakat dan lingkungan yang tidak sehat. Responsif Gender di bidang kesehatan merupakan perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kesehatan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya dan pelaksanaannya. Responsif gender di bidang kesehatan perlu dilakukan untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki

memperoleh akses terhadap sumber daya kesehatan, partisipasi dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan khususnya bidang kesehatan, serta terhindarnya laki-laki dan perempuan yang mengalami diskriminasi layanan kesehatan, akibat perencanaan dan pelaksanaan yang tidak responsif gender

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah Daerah Kota Parepare melalui Dinas Kesehatan Kota Parepare agar targetnya dapat terpenuhi. Masih adanya beberapa indikator seperti pelayanan kesehatan usia produktif yang masih jauh di bawah target yang ditetapkan.

4. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di bidang kesehatan.

Masih adanya beberapa indikator TPB yang masih jauh di bawah target dan kurang lengkapnya data untuk memenuhi pencapaian target TPB

## 2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Parepare dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, adalah sebagai berikut :

beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Parepare dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. tenaga kesehatan dan kader posyandu yang tidak intensif memantau ibu hamil yang beresiko tinggi di wilayah kerjanya;
3. masih adanya ibu hamil yang memeriksakan kehamilan pertama di usia kehamilan lebih dari 12 minggu;
4. masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
5. masih kurangnya frekuensi pelaksanaan edukasi pada masyarakat berisiko;
6. belum ada puskesmas mampu poned;
7. belum adanya regulasi yang mengatur persalinan di pelayanan kesehatan;
8. belum semua puskesmas menerapkan Poli MTBS;



9. pemantauan pasien yang sedang mengalami pengobatan tidak dilakukan secara intensif khususnya dari pemantauan dari keluarga terdekat. Obat TB harus diminum secara rutin dan harus habis, ketika Obat TB tidak diminum sesuai aturan medis maka bakteri TB di dalam tubuh mengalami resistensi sehingga akan terjadi gagal pengobatan;
10. kurang intensifnya tenaga kesehatan dan kader dalam melakukan pencarian orang dengan terduga Tuberkulosis dan kurangnya keterlibatan lintas sektoral dalam penanganan penyakit Tuberkulosis;
11. makin berkembangnya sumber penularan HIV yang berasal dari berbagai faktor risiko;
12. teknologi seksualitas yang semakin canggih dengan tersedianya fitur teknologi komersil seks dan mudahnya akses hubungan seks komersil dan tumbuhnya beragam orientasi seksual;
13. Populasi seks beresiko tinggi semakin bertambah disertai juga kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan kondom dalam pencegahan penyakit menular seksual;
14. kurangnya jumlah tenaga kesehatan melakukan *screening* penyakit terhadap kelompok usia produktif;
15. masih banyaknya pasangan usia subur yang belum menggunakan kontrasepsi karena diakibatkan oleh faktor agama, kesehatan, efek samping kontrasepsi, keluarga yang tidak mendukung, ketidakcocokan dengan alat kontrasepsi;
16. pengetahuan Sang Ibu yang kurang memadai dan asupan nutrisi yang kurang baik bagi ibu dan balita;
17. asupan zat besi yang tidak memadai, tingkat pendapatan yang kurang, pengetahuan yang kurang dan dukungan keluarga yang kurang;
18. masih banyaknya kelompok usia remaja belum memahami bahaya merokok sehingga masih mencoba rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik;
19. pola makan yang berlebihan yang tinggi lemak dan gula serta kurang serat dan aktifitas fisik yang kurang gerak;
20. masih banyak Rumah Tangga yang belum melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun

## E. STRUKTUR ORGANISASI

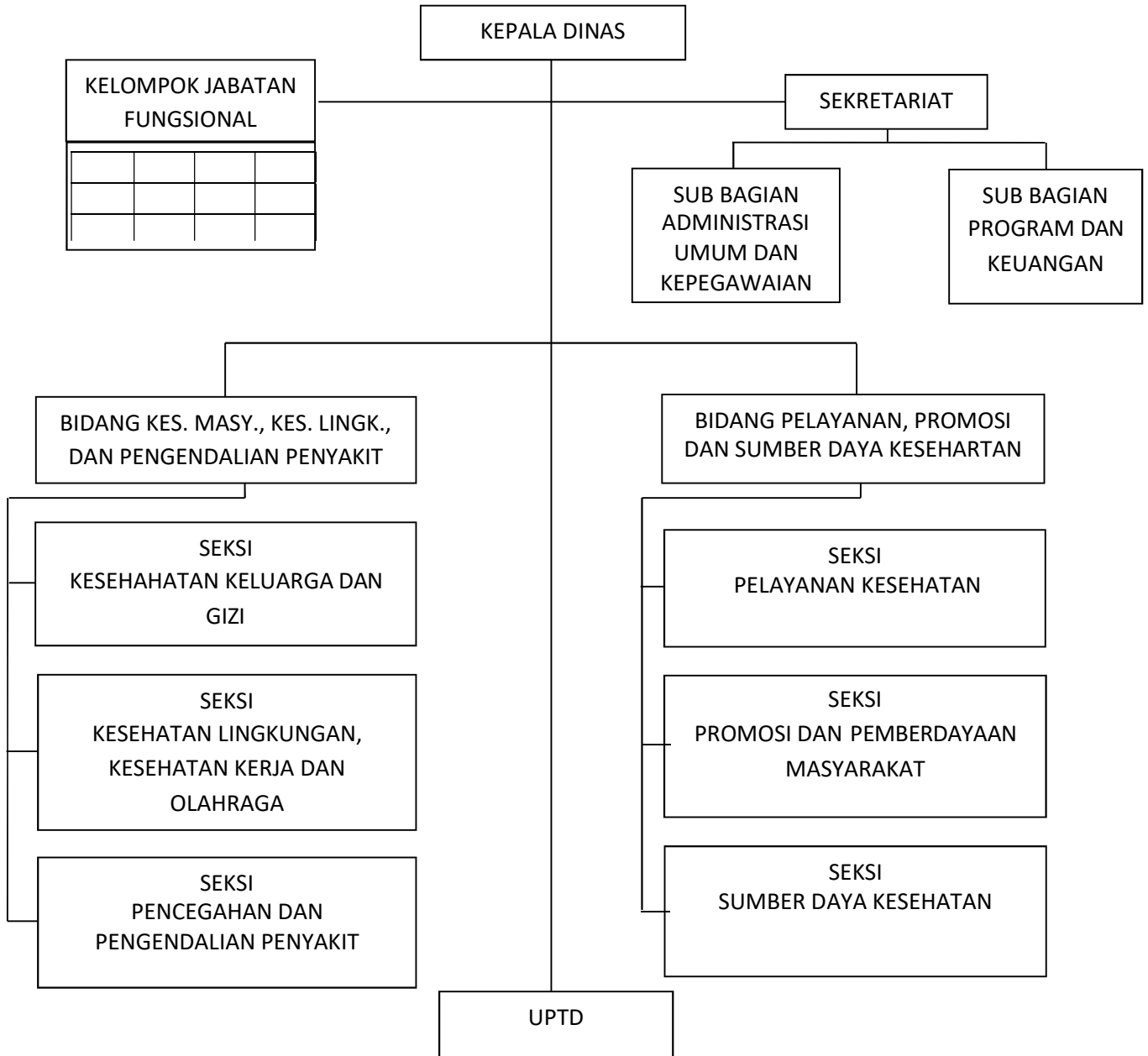
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 52 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare dibantu oleh :

1. Sekretaris, membawahi 2 (dua) sub bagian :
  - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
  - a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
  - b. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga
  - c. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Kepala Bidang Pelayanan Promosi, dan Sumber Daya Kesehatan
  - a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
  - b. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Parepare dapat dilihat pada bagan berikut :

**F. STRUKTUR ORGANISASI**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE 2022**



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2023 didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan terdistribusi pada

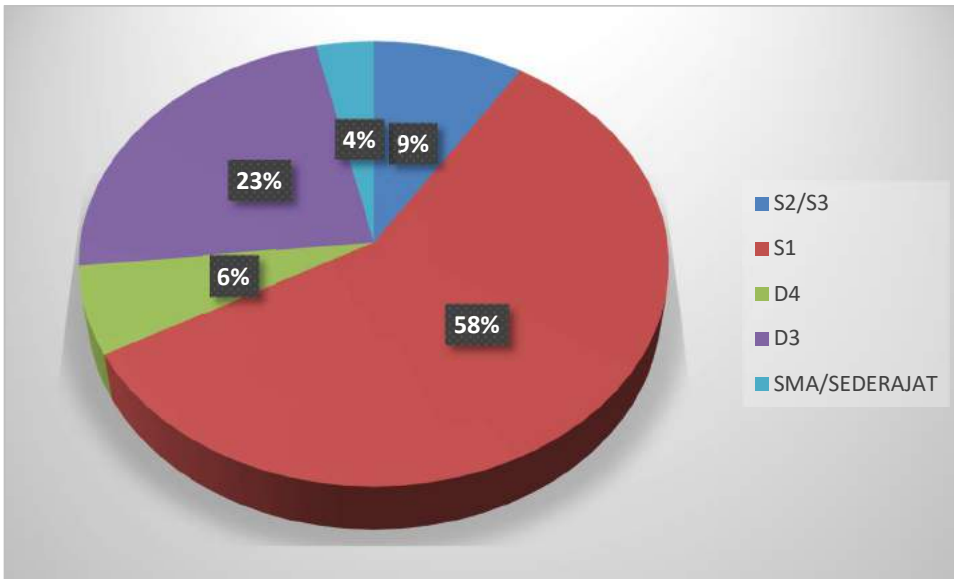
sekretariat dan bidang-bidang. Komposisi aparatur Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan Jabatan**  
**Per 31 Desember Tahun 2023.**

Jenjang	Pendidikan		Total	Jenjang	Pangkat		Total	Jenjang	Jabatan		Total
	Jumlah (Org)				Jumlah (Org)				Jumlah (Org)		
	L	P			L	P			L	P	
S2	10	24	34	Pembina Utama	0	1	1	Eselon IIB	0	1	1
S1	33	182	215	Pembina Utama Muda	0	21	21	Eselon IIIA	0	1	1
D4	4	20	24	Pembina Tk. I	7	36	43	Eselon IIIB	2	0	2
D3	8	81	87	Pembina	18	56	74	Eselon IVA	2	2	4
SMA / Sederajat	4	9	13	Penata Tk. I	10	79	89	Eselon IVB	0	2	2
<b>JUMLAH</b>	<b>59</b>	<b>316</b>	<b>375</b>	Penata	10	64	74	Fungsional Khusus	53	285	338
				Penata Muda Tk.I	9	29	38	Fungsional Umum	4	19	23
				Penata Muda	4	18	22	Tubel	2	6	8
				Pengatur Tk.I	1	8	9	<b>JUMLAH</b>	59	316	375
				Pengatur	0	4	4				
				<b>JUMLAH</b>	<b>59</b>	<b>316</b>	<b>375</b>				

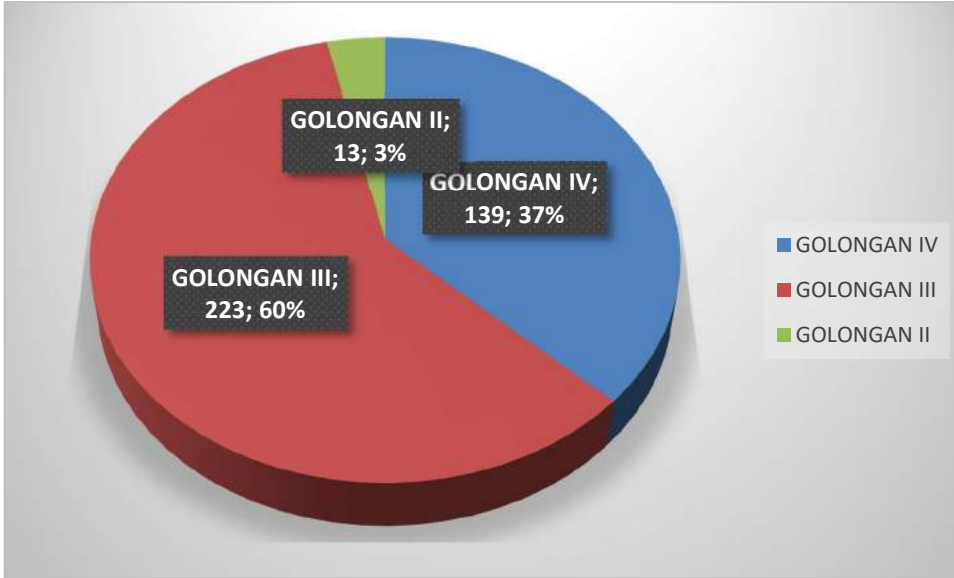
Aparatur Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2023 berjumlah 375 orang, yang terdiri dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 34 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 217 orang, Diploma 4 (D4) berjumlah 24 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 87 orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat sebanyak 13 Orang.

**Grafik 1.1 Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

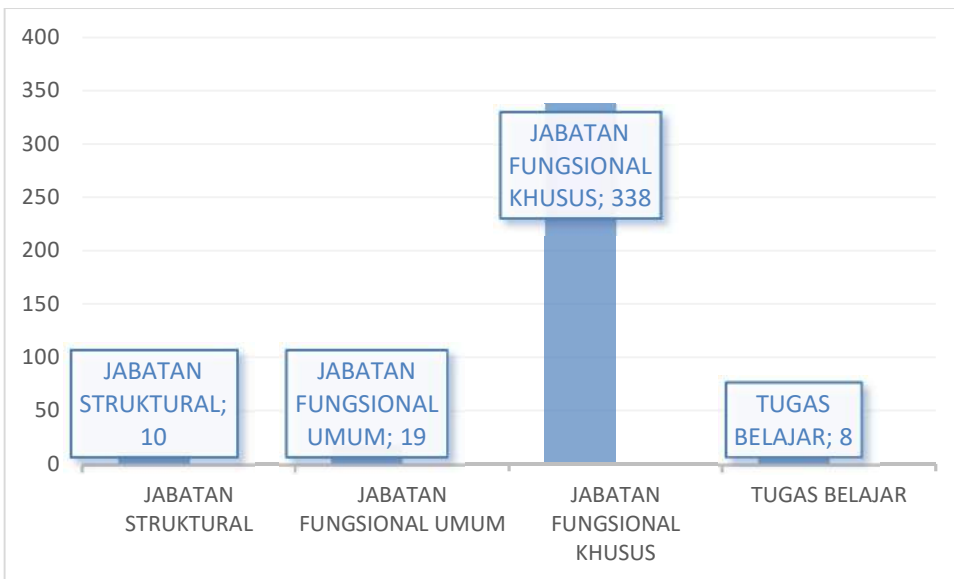


Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur Dinas Kesehatan Kota Parepare cukup tinggi, namun penempatan aparatur belum sesuai dengan tugas fungsionalnya sehingga mempengaruhi kinerja organisasi. Diperlukan penempatan pegawai berdasarkan tugas fungsionalnya agar kinerja pegawai yang fungsional dapat mendorong kinerja organisasi. Dari segi kepangkatan, aparatur Dinas Kesehatan terdiri dari 139 orang aparatur golongan IV, 223 orang berpangkat Golongan III, 13 orang aparatur berpangkat Golongan II. Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 (satu) orang eselon IIb, 1 (satu) orang eselon IIIa, 2 (dua) orang eselon IIIb, 4 orang eselon IVa serta 2 orang eselon IVb

**Grafik 1.2 Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023 Berdasarkan Golongan**



**Grafik 1.3 Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023 Berdasarkan Jabatan**



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sebagai sasaran bagi seluruh komponen instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

### A. TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu kepada Visi dan Misi Walikota yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka tujuan utama yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Utama Dinas Kesehatan

MISI KE -1		
Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan		
No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan	Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan
MISI KE -2		
Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional		
1	Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan dan strategi utama di atas, maka dibuatlah strategi dan arah kebijakan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Tahun 2023 Dinas Kesehatan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan	Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan berbasis regional	Pemantapan fungsi rumah sakit regional dan rumah sakit rujukan untuk pelayanan kesehatan antar wilayah
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas kesehatan

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis untuk tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut ini:





Tabel 2.3  
Tujuan ,Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan	Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan	Kontribusi sektor jasa kesehatan terhadap PDRB (%)	Persen	4,60	6,02
Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	Persen	78,74	79,85

## B. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2022, IKU dan APBD. Dinas Kesehatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan	Kontribusi sektor jasa kesehatan terhadap PDRB (%)	Persen	6,02
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare	Indeks Kesehatan	Persen	79,85

### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Kesehatan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2022	Target Kinerja 2023
1	Kontribusi sektor jasa kesehatan terhadap PDRB (%)	%	5,58	6,02
2	Indeks Kesehatan	%	79,34	79,85

#### E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 84.152.178.974 yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7  
Rencana Belanja Dinas Kesehatan TA. 2023

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Operasi	81.069.539.411	96,33
2	Belanja Modal	3.082.639.563	3,66
<b>Jumlah</b>		<b>84.152.178.974</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8  
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2023

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan	Kontribusi sektor jasa kesehatan terhadap PDRB (%)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	5.390.479.884	6,40
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare	Indeks Kesehatan		44.815.721.092	53,25
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	41.807.407.892	49,68
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	527.124.300	0,62
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	330.908.000	0,39
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.150.280.900	2,55

Pada tabel di atas, jumlah anggaran dengan persentase terbesar pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebesar 53,25 %. dan Sasaran meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan terhadap PDRB adalah 6,40 %

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) SKPD Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggung jawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## A. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.2  
Capaian kinerja sasaran strategis

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	ANGGARAN (RP)
Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan	Kontribusi sektor jasa kesehatan terhadap PDRB (%)	5,78	6	5.390.479.884
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare	Indeks Kesehatan	79,85	79,66	44.815.721.092

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2023 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD Pemerintah Kota Parepare maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dari Dinas Kesehatan dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

## Sasaran 1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan

### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	capaian (%)
1	Meningkatnya kontribusi sektor Jasa kesehatan	Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan terhadap PDRB (%)	PDRB Sektor Jasa Kesehatan dibagi Jumlah Keseluruhan PDRB	6,02	5,34	88,70
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						88,70

Sumber data : Badan Pusat Statisti kota Parepare 2023

Metode perhitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran pemerintah dari realisasi menurut fungsi kesehatan sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi yaitu jumlah pasien rawat jalan dan inap dan harga kamar. Berdasarkan hasil hitungan *BPS kota parepare* realisasi Kontribusi sektor jasa kesehatan terhadap PDRB sebesar 5,34 % pada tahun 2023 dari target 6.02 % hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 88,70 %, atau kategori “TINGGI”.

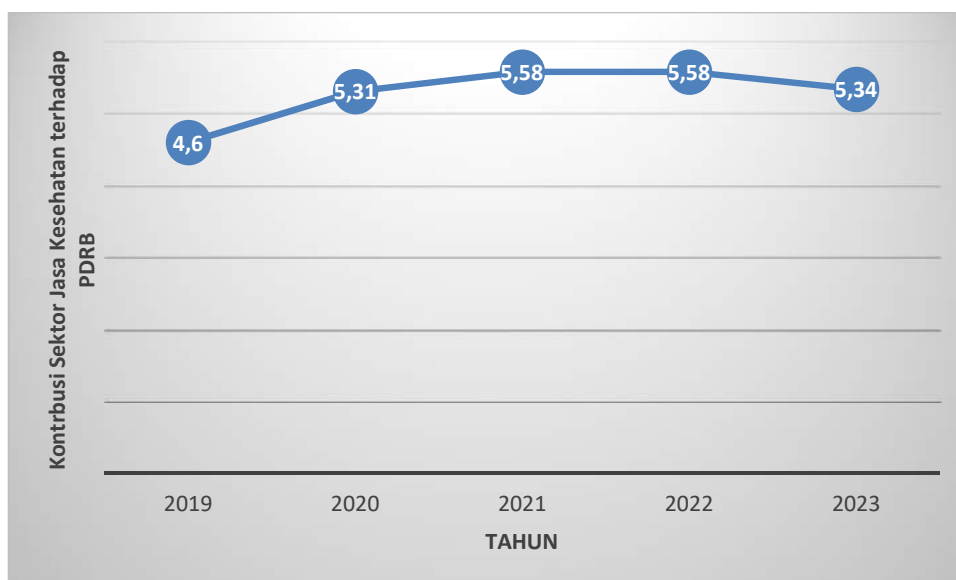
### b. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berkenan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021		2022		2023	
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	capaian	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kontribusi sektor Jasa kesehatan	Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan terhadap PDRB (%)	(%)	4,6	5,31	5,58	100	5,58	101,75	5,34	88,70

Realisasi kinerja indikator kontribusi sektor jasa kesehatan terhadap PDRB bila dibandingkan dengan 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dari 4,6 persen pada tahun 2019 naik menjadi 5,34 persen pada tahun 2023, secara rata-rata tumbuh sebesar 0,16 per tahun.



**GRAFIK REALISASI KONTRIBUSI SEKTOR JASA KESEHATAN TERHADAP PDRB TAHUN 2019-2023**



**c. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun Berkenan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPJMD**

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	capaian (%)
1	Meningkatnya kontribusi sektor Jasa kesehatan	Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan terhadap PDRB (%)	persen	5,34	6,02	88,70

Realisasi Kinerja hingga tahun 2023 untuk indikator Kontribusi jasa kesehatan terhadap PDRB (%), terhadap target kinerja RPJMD akhir periode belum tercapai, dimana target pada akhir RPJMD sebesar 6,02% yang terealisasi pada tahun 2023 sebesar 5,34 % dengan capaian 88,70 persen, yang mana masih ada selisih sebesar 0,68 %.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

PDRB Jasa kesehatan meliputi kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulau dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan dirumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial mencakup : jasa rumah sakit, jasa klinik, jasa rumah sakit lainnya yaitu praktik dokter, jasa pelayan kesehatan yang dilakukan oleh kesehatan, jasa angkutan khusus para medis, jasa pelayanan kesehatan paramedis, jasa pelayanan penunjang pengangjutan orang sakit, jasa kesehatan hewan dan jasa kesehatan sosial.

Keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian target disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

Adanya dukungan dari aparaturnya berupa rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah diberikanyang bekerja secara maksimal dan adanya fasilitas kerja (sarana dan prasarana kesehatan yang memadai).

Jumlah Kunjungan di Rumah Sakit Andi Makkasau pasien baik rawat inap maupun rawat jalan pada Tahun 2023 sebesar 80.256 kunjungan dan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, jumlah kunjungan sebesar 60.459 Kunjungan maka jumlah kunjungan mengalami peningkatan sebesar 132,74 % Hal ini selaras dengan hasil survei internal terkait Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan Tahun 2023 adalah sebesar 88,82 dan status akreditasi adalah paripurna

Tahun 2023, penggunaan tempat tidur di UPT Rumah Sakit Andi Makkasau atau nilai BOR secara umum tahun 2023 adalah 68 %. Hal ini berada dalam nilai Parameter BOR ideal yakni 60-85 %. TOI turn Over Interval merupakan tingkat hari tempat tidur tidak ditempati dari sampai terisi berikutnya adalah 2 hari dari dan ini berada dalam kondisi ideal yakni kisaran 1-3 hari. Idealnya dalam 1 (satu) tahun, Length Of Stay ( LOS ) yang merupakan indikator untuk mengukur rata-rata lama waktu pasien pada tahun 2022 adalah rata-rata 3 hari. Angka ini menunjukkan kinerja pelayanan asuhan keperawatan telah terlaksana dengan baik, Angka kematian bersih dalam waktu 48 jam setelah penderita dirawat di Rumah Sakit adalah 14/1000

Jumlah Kunjungan di Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie pasien baik rawat inap maupun rawat jalan pada Tahun 2023 sebesar 16.311 kunjungan dan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, jumlah kunjungannya sebesar 4.965 atau mengalamai peningkatan sebesar 329%. maka jumlah kunjungan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2022, penggunaan tempat tidur di UPT Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie atau nilai BOR secara umum tahun 2023 adalah 21,4 %. Hal ini tidak berada

dalam nilai Parameter BOR ideal yakni 60-85 %. TOI turn Over Interval merupakan tingkat hari tempat tidur tidak ditempati dari sampai terisi berikutnya adalah 1 hari dan ini berada dalam kondisi ideal yakni kisaran 1-3 hari

Jumlah tempat tidur sebanyak 209 buah dan Length Of Stay ( LOS ) yang merupakan indikator untuk mengukur rata-rata lama waktu pasien pada tahun 2023 adalah rata-rata 3 hari. Angka ini menunjukkan kinerja pelayanan asuhan keperawatan telah terlaksana dengan baik, Angka kematian bersih dalam waktu 48 jam setelah penderita dirawat di Rumah Sakit adalah 9 /1000. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 93 % dengan status akreditasi adalah paripurna

#### **e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam mewujudkan target kinerja dari sasaran meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan, maka tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.390.479.884 dengan realisasi sebesar Rp 5.087.660.455 atau sebesar 94,38 %

#### **f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - a.4.Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
    - a.5.Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
    - a.3.Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - a.4.Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - a.6.Pengadaan Obat, Vaksin
    - a.7.Pengadaan Bahan Habis Pakai

- a.8. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

## Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Parepare

**Tabel 3.4** Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Parepare

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kesehatan	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\min}}{\text{AHH}_{\max} - \text{AHH}_{\min}} \times 100\%$ <p>AHH - Angka Usia Harapan Hidup</p>	79.85	79,66	99,76
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>Persentase</b>			<b>99,76</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran indeks Kesehatan di atas ditetapkan bahwa target tahun 2023 sebesar 79.85% adapun realisasi sebesar 79.66% sehingga dapat terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 99.76 persen atau kategori **“Sangat Baik”**.

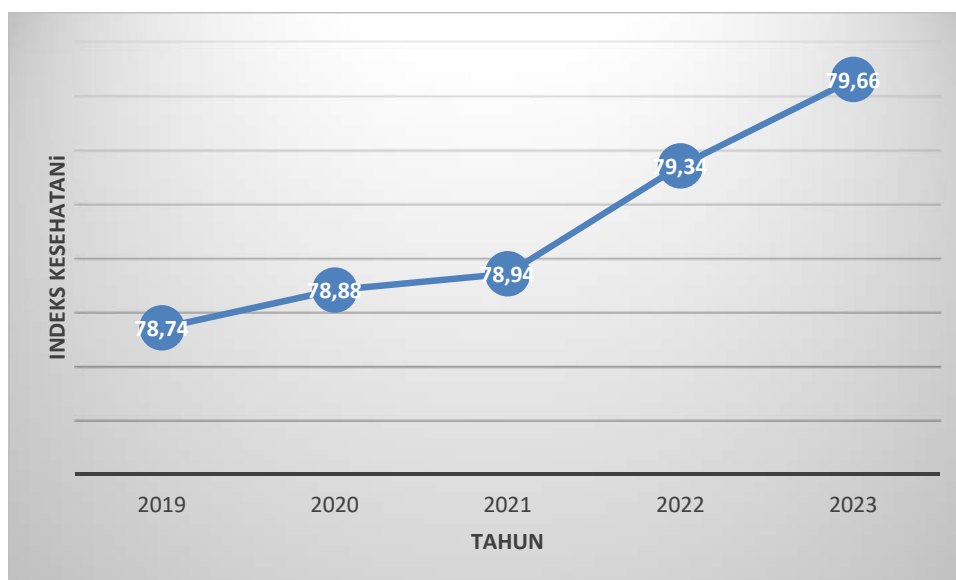
Indeks Kesehatan Kota Parepare pada Tahun 2023 adalah 79,66, bila dibandingkan dengan rata-rata Indeks Kesehatan di 24 Kabupaten Sulawesi Selatan adalah 77,12 maka Indeks Kesehatan Kota Parepare di atas rata-rata capaian di 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan dan bila dibandingkan dengan indeks kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan adalah 78,80 maka Indeks Kesehatan Kota Parepare masih lebih tinggi.

### a. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berkenan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020		2021		2022		2023	
			Realisasi	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kesehatan	Tahun	78,74	78,88	100,74	78,94	99,67	79,34	99,76	79,66	99,76

Perkembangan usia harapan hidup Kota Parepare selama kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan, selama periode tersebut, secara rata-rata Indeks *tumbuh sebesar 0,011 per tahun*. Pada Tahun 2019 sebesar 78,74 persen dan Pada Tahun 2023 mencapai 79,66 persen.

**GRAFIK INDEKS KESEHATAN TAHUN 2019-2023**



**b. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun Berkenan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2023	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Indeks Kesehatan	Tahun	79,66	79,85	98,86

Jika membandingkan realisasi Indeks Kesehatan Tahun 2023 sebesar 79,66 % dengan target pada akhir RPJMD sebesar 79,85% maka indeks kesehatan belum mencapai target pada akhir RPJMD, yang mana masih ada selisih 0,19%.

**c. Perbandingan Indeks Kesehatan Kota Parepare dengan Indeks Kesehatan Nasional**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2023	Indeks Kesehatan Nasional Tahun 2023
1	Indeks Kesehatan	Tahun	79,66	82,97

Jika membandingkan realisasi Indeks Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023 sebesar 79,66 persen dengan indeks kesehatan nasional sebesar 82,97 maka indeks kesehatan nasional masih lebih tinggi dibandingkan indeks kesehatan Kota Parepare.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, antara lain :

**1). Faktor Pendukung Keberhasilan**

- a. Adanya dukungan anggaran Baik Dari APBD Murni Kota Parepare dan Anggaran Transfer dari Pusat yakni DAK Fisik dan DAK Nonfisik
- b. Penguatan pada Pelayanan Kesehatan dasar yang berbasis di Puskesmas dengan penekanan pada upaya-upaya promotif dan preventif
- c. Peningkatan kualitas pada pelayanan kesehatan rujukan dengan peningkatan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Andi Makkasau dan Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie
- d. Pelayanan kesehatan yang cepat dan tanggap melalui pelayanan Call Centre 112
- e. Keterlibatan lintas sektor dalam mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat dan penguatan pada upaya-upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat seperti keterlibatan kader posyandu

**2). Permasalahan / Hambatan yang Dihadapi sehingga Indeks Kesehatan tidak tercapai target :**

- a. Tingkat fertilitas dan kematian
- b. Masih adanya kasus kematian balita sebanyak 1 kasus
- c. Masih adanya kasus kematian neonatal sebanyak 25 kasus
- d. Masih adanya kasus kematian ibu sebanyak 3 kasus
- e. Tingkat kematian akibat penyakit TB Paru sebesar 21 Kasus

**3). Strategi Pemecahan Masalah**

- a. Penguatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat seperti kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua lintas sektor terkait agar upaya-upaya kesehatan untuk pencegahan kematian bayi dan ibu hamil dapat dilaksanakan dengan baik agar dapat mengurangi kasus kematian bayi dan ibu hamil
- b. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas khususnya penyediaan alat-alat kesehatan kegawatdaruratan maternal dan neonatal agar puskesmas dapat menangani kasus-kasus komplikasi kebidanan
- c. Meningkatkan kegiatan promosi perilaku hidup sehat dalam masyarakat seperti Germas dan menciptakan lingkungan yang sehat dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan khususnya tenaga-tenaga kesehatan dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

- e. Mengaktifkan kembali Layanan PONEB yang merupakan layanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas rawat inap terkait kasus emergensi obstetri dan neonatus tingkat dasar selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu

#### e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, maka dalam APBD Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 44.815.721.092,- yang terealisasi sebesar Rp. 40.266.785.510 atau 89,84 %.

#### f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
    - a.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
    - a.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
    - a.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
    - a.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
    - a.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
    - a.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
    - a.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
    - a.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
    - a.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
    - a.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
    - a.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
    - a.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
    - a.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
    - a.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
    - a.16. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
    - a.17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
    - a.18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
    - a.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
    - a.20. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
    - a.21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
    - a.22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
    - a.23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
    - a.24. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
    - a.25. Operasional Pelayanan Puskesmas

- a.26. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- a.27. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- a.28. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- a.29. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- a.30. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
  - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
  - b1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota
    - a.1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
  - b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
    - b.1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
    - b.2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - c.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
  - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
    - a.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
    - b.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
  - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a.1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - b.1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)



**C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023****1. Realisasi Penerimaan**

Terdiri dari :

Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp. 1.351.441.800,00	(108,66 %)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp. 4.410.000,00	(100 %)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp. 8.630.307.615,00	(107,88)
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	Rp. 8.858.939,00	
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	Rp 3.820,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 9.995.022.174,00</b>	<b>(108,08)</b>

**2. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran APBD yang dikelola SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 adalah 75.080.775.281

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja SKPD

Dinas Kesehatan terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Realisasi anggaran operasi SKPD Dinas Kesehatan dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 72.382.418.086,- (86,01%) yang

diarahkan untuk :

Belanja Pegawai Rp. 28.479.965.652,

Belanja Barang dan Jasa Rp 43.902.452.434

2) Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.698.357.195,- (87,53%)

**3. Rincian realisasi anggaran**

Adapun rincian realisasi anggaran program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023, sebagai berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
2.	Kesehatan	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.33.945.977.998,- dengan realisasi Rp.29.725.879.316,- atau 87,57 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan	<b>Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi serta administrasi umum dan keuangan, dengan target 100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
			<b>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian perencanaan dan evaluasi kinerja yang benar dan tepat waktu, dengan target 100 %	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (Renja 2023 dan Perubahan Renja 2022), dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(5) Koodinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA SKPD, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP dan perjanjian kinerja, dan rencana aksi, dengan target 2 laporan	2 laporan	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah, target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			<b>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian keuangan yang benar dan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan, dengan target 371 orang/bulan	371 orang/bulan	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 100 dokumen	100 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD, dengan target 2 laporan	2 laporan	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran SKPD, dengan target 18 laporan	18 laporan	100 %		



No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			<b>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/kursus singkat, dengan target 6 orang	6 orang	100 %		
			(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek, dengan target 6 orang	6 orang	100 %		
			<b>d. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan media cetak yang tersedia, dengan target 5 dokumen	5 dokumen	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas, dengan target 50 laporan	50 laporan	100 %		
			<b>e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan target 5 unit	5 unit	100 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan target 5 unit	5 unit	100 %		
			<b>f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, target 4 laporan	4 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, target 4 laporan	4 laporan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor, dengan target 4 laporan	4 laporan	100 %		
			<b>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan terbayar pajak kendaraannya, dengan target 3 unit	3 unit	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, dengan target 10 unit	10 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			(5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbayarnya utang retensi pagar, dengan target 1 kali	0	0	Utang Retensi	
			<b>2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.30.177.788.190,- dengan realisasi Rp.28.398.660.812,- atau 94,10 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %</b>	<b>97,07 %</b>	<b>97,07 %</b>		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota, dengan target 100 %	83,33 %	83,33 %		
			(1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terbayarnya utang perencanaan pembangunan RS dr Hasri Ainun Habibie, dengan target 1 kali	0 kali	0 %	Rekanan tidak mengajukan pencairan	Menyampaikan kepada rekanan
			(2) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbayarnya utang perencanaan rehab poskeskel, dengan target 1 kali	1 kali	100 %		
			(3) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan sarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(5) Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(6) Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			<b>b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	107,88 %	107,88 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 2.658 orang	2.112 orang	79,46 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani, dengan target 2.413 orang	2.407 orang	99,75 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang dilayani, dengan target 2.416 orang	2.416 orang	100 %		



No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani, dengan target 11.755 orang	8.647 orang	73,56 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani, dengan target 16.419 orang	16.419 orang	100 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang dilayani, dengan target 15.529 orang	15.529 orang	100 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah pasien penderita hipertensi yang dilayani, dengan target 2.410 orang	4.716 orang	195,68%		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah pasien penderita diabetes melitus yang dilayani, dengan target 2.699 orang	2.950 orang	109,30%		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang dilayani, dengan target 344 orang	309 orang	89,83 %		
			(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilayani, dengan target 3.932 orang	3.843 orang	97,74 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani, dengan target 4.974 orang	4.705 orang	94,59 %		
			(12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(15) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				kesehatan, dengan target 1 dokumen				
			(16) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan target 10 orang	10 orang	100 %		
			(18) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(19) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(21) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/ nasional yang didistribusikan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(22) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(23) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(24) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(25) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria, dengan target 7 orang	18 orang	257,14 %		
			<b>c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	Persentase penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.527.124.300,- dengan realisasi Rp.293.633.006,- atau 55,70 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan target 100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
			<b>a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan</b>	<b>Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			<b>UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota, dengan target 100 %</b>				
			(1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), dengan target 200 orang	200 orang	100 %		
			(2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			<b>4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.330.908.000,- dengan realisasi Rp.272.336.000,- atau 82,30 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase sarana kesehatan, penghasil dan distribusi alkes dan produk makanan yang diperiksa dan dibina, dengan target 100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
			<b>a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT), dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengendalian dan Pengawasan, serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT), dengan target 1 dokumen				
			<b>b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor pirt sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.847.168.100,- dengan realisasi Rp.594.998.100,- atau 70,23 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %</b>	100 %	100 %		
			<b>a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase hasil advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 100%	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
		<b>UPTD PUSKESMAS LAKESSI</b>	<b>1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.2.338.739.534,- dengan realisasi Rp.1.958.297.823,- atau 83,73 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %</b>	<b>70,79 %</b>	<b>70,79 %</b>		
			<b>a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	67,00 %	67,00 %		
			(1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, dengan target 15 unit	10 unit	67,00 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 341 orang	157 orang	46,14 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani, dengan target 1.919 orang	630 orang	33,00 %		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan pendidikan	2.880 orang	96,00 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dasar, dengan target 3.000 orang				
			(5) Pengelolaan Pelayanan pada usia Produktif	Jumlah usia produktif yang dilayani, dengan target 450 orang	450 orang	100 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang dilayani, dengan target 878 orang	878 orang	100 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, target 10 orang	26 orang	260 %		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Menderita Tuberculosis	Jumlah orang terduga menderita <i>tuberculosis</i> yang dilayani, dengan target 71 orang	71 orang	100 %		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Menderita HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang dilayani, dengan target 271 orang	271 orang	100 %		
			(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(13) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen pelayanan promosi kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(14) Pengelolaan Surveilens Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan surveilens kesehatan, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			(15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan target 10 orang	26 orang	260 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(17) Investigasi Awal Kejadian yang tidak diHarapkan (Obat Massal)	Jumlah laporan investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (obat massal), dengan target 4 laporan	4 laporan	100 %		
			(18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis, dengan target 199 orang	84 orang	42,00 %		
			(19) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(20) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			<b>2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.142.400.000,- dengan realisasi Rp.142.400.000,- atau 100 % persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
			<b>a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		



No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
		<b>UPTD PUSKESMAS CEMPAE</b>	<b>1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.2.492.343.953,- dengan realisasi Rp.2.209.899.378,- atau 89,00 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %</b>	<b>74,50 %</b>	<b>74,50 %</b>		
			<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar, dengan target 40 unit	24 unit	60,00 %	Keterbatasan anggaran	Dialihkan ke Dinas Kesehatan
			<b>(1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi, dengan target 40 unit alkes	24 unit alkes	60,00 %	Keterbatasan anggaran	Dialihkan ke Dinas Kesehatan
			<b>b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	89,00 %	89,00 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 284 ibu hamil	258 ibu hamil	90,00 %	Pencatatan yang kurang lengkap pada faskes lain	Meningkatkan koordinasi
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani, dengan target 1.180 balita	1.196 balita	101,00 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 300 orang	358 orang	119,00%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan target 5.749 orang	5.790 orang	101,00 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan target 3.485 orang	3.778 orang	108,00 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar, dengan target 70 orang	21 orang	30,00 %	Target yang dimasukkan termasuk gangguan jiwa ringan	Mengkoordinasikan penatapan target
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, dengan target 198 orang	224 orang	113 %		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, dengan target 547 orang	658 %	120%		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 120 dokumen	120 dokumen	100 %		
			(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, dengan target 24 dokumen	24 dokumen	100 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 60 dokumen	60 dokumen	100 %		
			(12) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, dengan target 36	36 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dokumen				
			(13) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan, dengan target 100 dokumen	100 dokumen	100 %		
			(14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan target 20 orang	20 orang	100 %		
			(15) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(16) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(17) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(18) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal), dengan target 5 laporan	5 laporan	100 %		
			(19) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 60 orang	73 orang	121 %		
			<b>2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.133.470.000,- dengan realisasi Rp.121.330.000,- atau 91 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			<b>a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
		<b>UPTD PUSKESMAS LAPADDE</b>	<b>1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.2.552.727.954,- dengan realisasi Rp.2.206.717.904,- atau 86,45 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan target 100 %</b>	<b>96,22 %</b>	<b>96,22 %</b>		
			<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi, dengan target 37 unit alkes	37 unit alkes	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kesehatan					
			<b>b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	92,44 %	92,44 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 467 orang	467 orang	100 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 2.128 orang	2.100 orang	98,00 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 3.213 orang	3.150 orang	98,00 %		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 5.400 orang	5.400 orang	100 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 259 orang	259 orang	100 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 567 orang	540 orang	95,00 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 749 orang	550 orang	73,00 %		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan Kesehatan, dengan target 59 orang	59 orang	100 %		
			(14) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(15) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(16) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(17) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal), dengan target 1 laporan	1 laporan	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 50 orang	50 orang	100 %		
			<b>2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.366.420.000,- dengan realisasi Rp.309.825.000,- atau 84,55 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
			<b>a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>b. Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) ,dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
		UPTD PUSKESMAS MADISING NA MARIO	<b>1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.2.147.937.459,- dengan realisasi Rp.2.008.384.560,- atau 93,00 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %</b>	96,00 %	96,00 %		
			<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota, dengan target 100 %	100 %	100%		
			(1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar, dengan target 12 unit	12 unit	100 %		
			<b>b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, target 100 %	112 %	112 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 130 ibu hamil	140 ibu hamil	107,69%		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani, dengan target 178 ibu bersalin	134 ibu bersalin	75,20 %	Target proyeksi tinggi	Mengkoordinasikan penetapan target
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang dilayani, target 164 bayi baru lahir	132 bayi baru lahir	80,50%	Target proyeksi tinggi	Mengkoordinasikan penetapan target
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani, dengan target 310 balita	310 balita	100 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani, dengan target 1.034 usia pendidikan dasar	1.034 anak usia pendidikan dasar	100 %		



No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 3.000 orang	3.000 orang	100 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang dilayani, target 2.233 orang usia lanjut	819 orang usia lanjut	36,70 %	Target proyeksi tinggi	Mengkoordinasikan penetapan target
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar, dengan target 20 orang	20 orang	100 %		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit tuberkulosis yang dilayani, dengan target 171 orang terduga TB	126 orang terduga TB	73,00 %		
			(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderit HIV yang dilayani, dengan target 593 penderita HIV	593 penderita HIV	100 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(14) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen pelayanan promosi kesehatan, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(15) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan, dengan target 40 dokumen	30 dokumen	75,00 %		
			(16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang penyalahguna napza yang dilayani, dengan target 36 penderita jiwa	36 penderita Jiwa	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(18) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(19) Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional yang didistribusikan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(20) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(21) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal), dengan target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			(22) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(23) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 171 orang	126 orang terduga TB	73,00 %		
			<b>2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.175.297.800,- dengan realisasi Rp.142.825.800,- atau 81,40 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			<b>a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
		<b>UPTD PUSKESMAS LOMPOE</b>	<b>1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.2.104.555.066,- dengan realisasi Rp.1.751.342.423,- atau 83,22 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %</b>	<b>112 %</b>	<b>112 %</b>		
			<b>a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target 100 %	112%	112 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 363 ibu hamil	345 ibu hamil	95,00 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani, dengan target 1.205 balita	1.208 Balita	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani, dengan target 1.028 usia pendidikan dasar	1.028 anak usia pendidikan dasar	100 %		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang dilayani, dengan target 3.580 usia produktif	3.580 usia produktif	100 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk usia lanjut yang dilayani, target 1.002 orang usia lanjut	980 orang usia lanjut	97,00 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang dilayani, dengan target 399 orang	321 orang	80,00 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(10) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan, target 12 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang penyalahgunaan NAPZA yang dilayani, target 15 penderita jiwa dan penyalahgunaan napza	44 penderita	293 %		
			(12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(13) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(14) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(15) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal), target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(16) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah, target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(17) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah, target 30 orang	40 orang	133 %		
			<b>2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.93.600.000,- dengan realisasi Rp.92.700.000,- atau 99,04 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan, dengan target 100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
			<b>a. Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Jumlah dokumen hasil promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
		UPTD PUSKESMAS LUMPUE	<b>1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.3.149.327.168,- dengan realisasi Rp.2.784.272.574,- atau 88,40 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %</b>	<b>121,83%</b>	<b>121,83 %</b>		
			<b>a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota, dengan target 100 %	121,83 %	121,83 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 954 Orang	817 orang	85,60 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 916 Orang	676 orang	73,70 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 495 orang	495 orang	100 %		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 6.380 orang	8.795 orang	137 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar, dengan target 73 orang	57 orang	78 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah orang mendapatkan pelayanan kesehatan orang	198 orang	176 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Tuberkolosis	terduga tuberkolosis, dengan target 112 orang				
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(10) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan Kesehatan, dengan target 51 orang	89 orang	174 %		
			(12) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(13) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(14) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(15) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	Jumlah dokumen investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Obat Massal)	dan pemberian obat massal), dengan target 1 dokumen				
			(16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis	Jumlah orang mendapatkan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis, dengan target 20 orang	65 orang	325 %		
			<b>2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.222.300.000,- dengan realisasi Rp.189.600.000,- atau 85,20 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
			a. <b>Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Jumlah dokumen hasil promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			b. <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		



No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
		UPTD PUSKESMAS LAULENG	<b>1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.897.806.530,- dengan realisasi Rp.734.188.539,- atau 81,77 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %</b>	<b>94,96 %</b>	<b>94,96 %</b>		
			<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota, dengan target 100 %	100 %	100%		
			(1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar, dengan target 14 unit	14 unit	100 %		
			<b>a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	94,96 %	94,96 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 228 orang	194 orang	85,08 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 1.221 orang	1.159 balita	94,92 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 600 orang	522 orang	87,00 %		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 1.200 orang	1.128 orang	94,00 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar, dengan target 30 orang	25 orang	83,33 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 160 orang	136 orang	85,00 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 363 orang	326 orang	90 %		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja & Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(14) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(15) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan operasional pelayanan puskesmas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(16) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan KIPI, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.79.425.000,- dengan realisasi Rp.77.740.000,- atau 97,88 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan target 100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
			<b>a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
		UPTD PUSKESMAS LEMOE	<b>1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.1.299.634.251,- dengan realisasi Rp.976.274.025,- atau 75,12 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %</b>	<b>88,50 %</b>	<b>88,50 %</b>		
			<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100%	30 %	30 %		
			(1) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ <i>regional maintainance</i> , target 10 unit	3 unit	30,00 %	Keterbatasan anggaran	Dialihkan ke Dinas Kesehatan
			<b>c. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	146,72 %	146,72 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 282 ibu hamil	95 ibu hamil	33,60 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani, dengan target 38 ibu bersalin	83 ibu bersalin	218,42%		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bay ibaru lahir yang dilayani, dengan target 32 bayi baru lahir	68 bayi baru lahir	212,5%		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani, dengan target 381 balita	378 balita	99,21 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani, dengan target 580 anak usia pendidikan dasar	480 anak usia pendidikan dasar	80,76 %		
			(6) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 500 orang	2.213 orang	442,6 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang dilayani, dengan target 616 orang usia lanjut	1.438 orang usia lanjut	233,44 %		
			(8) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar, dengan target 5 orang	12 orang	240 %		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang dilayani, dengan target 24 orang	67 orang	279,16%		
			(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(13) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen pelayanan promosi kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(14) Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang penyalahguna napza yang dilayani, target 1 penderita jiwa dan penyalahgunaan napza	1 dokumen	100 %		
			(16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(17) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(18) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 25 Orang	12 orang	48,00 %		
			<b>2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan</b> Alokasi anggaran sebesar Rp.81.200.000,- dengan realisasi Rp.75.000.000,- atau 92,36 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<b>Persentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
			<b>a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			<b>b. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023 memberikan gambaran terhadap berbagai capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan stakeholders pembangunan daerah dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Untuk lebih menyempurnakan laporan ini akan dilakukan berbagai langkah agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan.

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018- 2023 yang merupakan wujud nyata pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2023. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran instansi Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan berbagai pihak dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut demi mewujudkan Visi Kota Parepare *“Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju Mandiri dan Berkarakter”*.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, antara lain :

1. Untuk tahun 2023, Dinas Kesehatan Kota Parepare telah menetapkan Rencana Kerja yang berisi beberapa program dan kegiatan untuk diimplementasikan pada tahun 2023. Penetapan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2018 – 2023
2. Evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator yang sebelumnya telah ditetapkan, yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*.

## **B. SARAN**

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Parepare di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu ditingkatkan sehingga data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dapat disajikan secara faktual.
2. Perlunya penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga penyelesaian kegiatan dapat lebih optimal.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada.
4. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat
5. Menyempurnakan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja



# LAMPIRAN

## TINDAK LANJUT REKOMENDASI TAHUN 2022

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
<b>A</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	
1	Agar membuat pedoman teknis perencanaan kinerja.	Telah dibuat pedoman teknis perencanaan kinerja
2	Agar perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).	Telah digambarkan di Dokumen Rensta 2024-2026
<b>B</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	
1	Agar membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Telah pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
2	Agar membuat SOP / mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Telah membuat SOP / mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
3	Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, karena masih berpedoman pada Perwali No 24 Tahun 2023 yang menekankan pada realisasi/penyerapan anggaran untuk pengurangan TPP
4	Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.	Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional karena masih berpedoman pada regulasi yang terkait dengan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah
5	Agar pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi khususnya refocusing anggaran. Target Kinerja disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
6	Agar pengukuran kinerja dapat mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.	Hasil pengukuran kinerja, jika kinerjanya adalah hasilnya rendah, maka akan ada penyesuaian strategi dengan mempertimbangkan faktor anggaran, kebijakan serta sumber daya yang tersedia

7	Agar pengukuran kinerja dapat mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.	Hasil pengukuran kinerja, jika kinerjanya adalah hasilnya rendah, maka akan ada kebijakan internal dengan mempertimbangkan faktor anggaran dan sumber daya yang tersedia
<b>C</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	
1	Agar dilakukan revidi laporan Kinerja	Revidi laporan kinerja berasal dari pihak eksternal yakni inspektorat karena lebih berkompeten
2	Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Perubahan budaya kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan dan komitmen semua pegawai dalam mencapai target kinerja

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
<b>D</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
1	Agar akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan sesuai standar. Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi (Aplikasi).	Evaluasi Kinerja dalam menggunakan aplikasi masih dalam tahap percobaan. Aplikasi yang digunakan di link <a href="https://dinkespare.my.id/dinkes/login.php">https://dinkespare.my.id/dinkes/login.php</a>
2	Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi Tahun 2023
1	Kontribusi sektor jasa kesehatan terhadap PDRB (%)	Persen	6,02	5,43
2	Indeks Kesehatan	Persen	79,85	79,66
No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2023	Realisasi Tahun 2023
1	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran baru	per 1000 KH	9,77	11,61
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi		981,00	972,00
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	per 1000 KH	0	0,41
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000 KH	8,49	10,37
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 KH	212,31	124,43
6	Rasio Posyandu per satuan balita	per 1000 balita	61,30	11,06
7	Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), puskesmas pemb. per 1000 penduduk	per 1000 pddk	0,29	0,29
8	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	per 1000 pddk	0,03	0,03
9	Rasio dokter persatuan penduduk	per 1000 pddk	0,0045	0,53
10	Rasio tenaga medis per 1.000 Penduduk	per 1000 pddk	0,0098	1,13
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	100,00	100,00
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	87,00	94,88
13	Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)	persen	100,00	100,00
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	100,00	100,00
15	Jumlah proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	persen		
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	persen	100,00	100,00
17	Non Polio AFP rate per 1.000 penduduk	per 1000 pddk	0,01	0,02
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	persen	100	100,00
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	70,42	67,52
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 pddk	290,09	322,50
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	persen	3,65	4,06
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	persen	87,00	67,52
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	persen	87,00	82,78
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100,00	100,00
25	Penderita diare yang ditangani	persen	100,00	100,00
26	Angka kejadian akibat malaria	kasus	17,00	18,00
27	Angka kematian akibat malaria	kasus	0	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	persen	0	0
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	persen	0	
30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	per 1000 pddk	0,35	0,87
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	persen	75,00	73,00
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	persen	50,00	77,78
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100,00	100,00

34	Cakupan kunjungan bayi	persen	100,00	100,00
35	Cakupan Puskesmas	persen	200,00	200,00
36	Cakupan pembantu puskesmas	persen	100,00	100,00
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	97,07	97,07
38	Cakupan pelayanan nifas	persen	87,35	94,25
39	Cakupann neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	90,00	100,00
40	Cakupan pelayanan anak balita	persen	100,00	73,56
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	100,00	100,00
42	Cakupan penjangingan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	100,00	99,00
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	100	100,00
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	100	100,00
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100,00	100,00
<b>No</b>	<b>Indikator SPM</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100,00
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	95,00
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	99,75
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	93,86
5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	99,74
6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	62,51
7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100,00
8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	30,41
9	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan Layanan kesehatan	Persen	100	108,93
10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani \kesehatan	Persen	100	87,04
11	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100,00
12	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	94,59
<b>No</b>	<b>INDIKATOR SDGs</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	85,00	90,89
2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	95,00	99,75
3	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	100,00	100,00

4	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	13,70	11,91
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	13,70	8,73
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Persen	13,90	8,35
7	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	5,00	
8	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	9,00	3,52
9	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persen	60,00	
10	Angka Kematian Ibu (AKI).	per 100.000 KH	212,31	124,43
11	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Persen	98,00	99,75
12	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persen	98,00	99,75
13	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	0	0,42
14	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	8,49	10,37
15	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	9,77	11,61
16	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	per 1000 pddk	0,35	0,01
17	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	per 1000 pddk	0,35	0,09
18	Kejadian TB per 1000 orang	per 1000 org	3,00	3,17
19	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	per 100.000 pddk	300,00	316,89
20	Persentase kecamatan yang mencapai 80 Persen imunisasi dasar lengkap bayi	Persen	100,00	100,00
21	Kejadian Malaria per 1000 orang.	per 1000 orang	0,07	0,11
22	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	per 100.000 pddk	14,00	11,85
23	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	6,00	2,00
24	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen		1,92
25	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	20,00	1,92
26	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen	30,00	2,78
27	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas	8,00	8,00
28	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Kasus	6,00	2,00
29	Unmet need pelayanan kesehatan			
30	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Per 1000 pddk	850,00	846,00
31	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	85,00	90,89
32	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persen	45,00	1,92
33	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Persen	100,00	100,00
34	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	99,00	100,00
35	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	1,11	
36	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Persen	90,00	97,79
37	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Kelurahan	22,00	22,00

38	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kelurahan	22,00	22,00
----	--	-----------	-------	-------